



B A P P E R I D A
Kabupaten Lombok Tengah



mandalika
the heart of lombok

LAPORAN KEUANGAN

TAHLIN ANGGARAN

2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Laporan Keuangan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Per 31 Desember 2025

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah dapat disusun dan disajikan dengan baik.

Laporan keuangan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perangkat daerah selama periode laporan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan adalah proses yang memerlukan ketelitian dan keterbukaan. Oleh karena itu, laporan ini telah disusun dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan yang berharga dalam penyusunan laporan ini.

Kami berharap laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna dan memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran dari berbagai pihak akan sangat kami hargai untuk penyempurnaan laporan ke depan.

Kab. Lombok Tengah, 28 Januari 2026

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,



H. LALU WIRANATA, S.IP., M.A.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197611282005011006

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan bebas salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kab. Lombok Tengah, 28 Januari 2026

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,



H. LAHU WIRANATA, S.IP., M.A.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197611282005011006

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA).....	ix
II. NERACA	xi
III. LAPORAN OPERASIONAL (LO)	xiii
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE).....	xv
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK).....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	3
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR	
PENCAPAIAN KINERJA APBD	5
2.1 Kebijakan Keuangan	5
2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	6
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	15
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum	15
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	15
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	17
4.1 Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan.....	17
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	17
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	18
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan SKPD	21
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	30
5.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	30
5.2 Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	35
5.3 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	41

5.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	46
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN.....	48
6.1 Gambaran Umum SKPD	48
6.2 Sumber Daya SKPD	48
BAB VII PENUTUP.....	49
LAMPIRAN.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025	5
Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025.....	7
Tabel 2.3. Realisasi Program dan Kegiatan APBD Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025	7
Tabel 3.1. Pencapaian Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan Perbandingan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2024	15
Tabel 5.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah.....	30
Tabel 5.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi	30
Tabel 5.3. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai	31
Tabel 5.4. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa.....	32
Tabel 5.5. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal	33
Tabel 5.6. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33
Tabel 5.7. Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) LRA.....	34
Tabel 5.8. Rincian Aset	35
Tabel 5.9. Rincian Aset Lancar	35
Tabel 5.10. Rincian Kas dan Setara Kas.....	36
Tabel 5.11. Uraian Kas di Bendahara Pengeluaran	36
Tabel 5.12. Persediaan	36
Tabel 5.13. Daftar Nilai Aset Tetap	37
Tabel 5.14. Aset Tetap Peralatan dan Mesin	37
Tabel 5.15. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025	37
Tabel 5.16. Aset Tetap Gedung dan Bangunan	38
Tabel 5.17. Aset Tetap Lainnya	38
Tabel 5.18. Rincian Kewajiban	39
Tabel 5.19. Rincian Kewajiban Jangka Pendek	39
Tabel 5.20. Rincian Utang Belanja	39
Tabel 5.21. Rincian Utang Belanja Pegawai	40
Tabel 5.22. Rincian Beban	41
Tabel 5.23. Rincian Beban Operasional	41
Tabel 5.24. Rincian Beban Pegawai	42
Tabel 5.25. Penjelasan Selisih Beban Pegawai LO	42
Tabel 5.26. Rincian Beban Barang dan Jasa	43
Tabel 5.27. Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa-LO	44
Tabel 5.28. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	44
Tabel 5.29. Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	45

Tabel 5.30. Rincian Surplus/(Defisit) – LO.....	45
Tabel 5.31. Ekuitas Awal - LO.....	46
Tabel 5.32. Surplus/(Defisit)-LO	46
Tabel 5.33. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan Mendasar	47
Tabel 5.34. Koreksi Ekuitas Aset Tetap	47
Tabel 5.35. Rincian Ekuitas Akhir	47
Tabel 6.1. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran
Lampiran 2	:	Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname Barang Habis Pakai
Lampiran 3	:	Berita Acara Rekonsiliasi
Lampiran 4	:	Kertas Kerja Beban Operasional-LO
Lampiran 5	:	Surat Tanda Setoran (STS) Sisa Uang Persediaan (UP)



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Per 31 Desember 2025 dan 2024



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	12,786,319,426.35	12,404,437,247.25	97.01	12,442,598,725.00
5.1	BELANJA OPERASI	12,336,045,126.35	11,958,394,947.25	96.94	11,819,558,725.00
5.1.01	Belanja Pegawai	6,314,503,322.36	6,110,479,861.25	96.77	5,993,953,943.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6,021,541,803.99	5,847,915,086.00	97.12	5,825,604,782.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	12,336,045,126.35	11,958,394,947.25	96.94	11,819,558,725.00
5.2	BELANJA MODAL	450,274,300.00	446,042,300.00	99.06	623,040,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	450,274,300.00	446,042,300.00	99.06	623,040,000.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	450,274,300.00	446,042,300.00	99.06	623,040,000.00
	JUMLAH BELANJA	12,786,319,426.35	12,404,437,247.25	97.01	12,442,598,725.00
	SURPLUS/DEFISIT	(12,786,319,426.35)	(12,404,437,247.25)	97.01	(12,442,598,725.00)

Kab. Lombok Tengah, 28 Januari 2026
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH



H. LALU WIRANATA, S.P., M.A.
NIP. 197611282005011006



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
NERACA

Per 31 Desember 2025 dan 2024



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	934.193.364,32	1.243.579.370,00
1.1	ASET LANCAR	5.642.000,00	930.000,00
1.1.12	Persediaan	5.642.000,00	930.000,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	5.642.000,00	930.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	5.642.000,00	930.000,00
1.3	ASET TETAP	928.551.364,32	1.242.649.370,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	6.338.569.002,17	6.009.236.702,17
1.3.02.02	Alat Angkutan	2.433.753.850,00	2.433.753.850,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	31.000.000,00	31.000.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	9.723.750,00	9.723.750,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.838.475.752,16	1.695.130.752,16
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	385.851.600,01	336.231.100,01
1.3.02.08	Alat Laboratorium	7.150.000,00	6.350.000,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	19.000.000,00	19.000.000,00
1.3.02.10	Komputer	1.613.614.050,00	1.478.047.250,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	163.000.000,00	163.000.000,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	163.000.000,00	163.000.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	14.910.000,00	14.910.000,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	11.035.000,00	11.035.000,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	3.875.000,00	3.875.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(5.587.927.637,85)	(4.944.497.332,17)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.554.945.574,85)	(4.914.775.269,17)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(32.982.063,00)	(29.722.063,00)
	JUMLAH ASET TETAP	928.551.364,32	1.242.649.370,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	934.193.364,32	1.243.579.370,00
2	KEWAJIBAN	557.140,00	164.309.507,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	557.140,00	164.309.507,00
2.1.06	Utang Belanja	557.140,00	164.309.507,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	557.140,00	164.309.507,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	557.140,00	164.309.507,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	557.140,00	164.309.507,00
3	EKUITAS	933.636.224,32	1.079.269.863,00
3.1	EKUITAS	933.636.224,32	1.079.269.863,00
3.1.01	Ekuitas	(11.470.801.022,93)	(11.363.328.862,00)
3.1.01.01	Ekuitas	993.186.529,66	857.048.306,00
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(12.463.987.552,59)	(12.220.377.168,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	12.404.437.247,25	12.442.598.725,00
3.1.03.01	RK PPKD	12.404.437.247,25	12.442.598.725,00
	JUMLAH EKUITAS	933.636.224,32	1.079.269.863,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	934.193.364,32	1.243.579.370,00

Kab. Lombok Tengah, 28 Januari 2026
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**



H. LAYU WIRANATA, S.IP., M.A
NIP.197612282005011006



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
Per 31 Desember 2025 dan 2024



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH



Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	12.463.987.552,59	12.220.377.168,00	243.610.384,59	1,99
8.1	BEBAN OPERASI	11.906.640.580,25	11.809.793.576,00	96.847.004,25	0,82
8.1.01	Beban Pegawai	5.946.727.494,25	5.983.488.794,00	(36.761.299,75)	(0,61)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	5.959.913.086,00	5.826.304.782,00	133.608.304,00	2,29
	JUMLAH BEBAN OPERASI	11.906.640.580,25	11.809.793.576,00	96.847.004,25	0,82
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	557.346.972,34	410.583.592,00	146.763.380,34	35,75
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisas	557.346.972,34	410.583.592,00	146.763.380,34	35,75
	JUMLAH BEBAN	12.463.987.552,59	12.220.377.168,00	243.610.384,59	1,99
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(12.463.987.552,59)	(12.220.377.168,00)	(243.610.384,59)	1,99

Kab. Lombok Tengah, 28 Januari 2026
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH



H. LILU WIRANATA, S.P., M.A.
NIP. 197511282005011006



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Per 31 Desember 2025 dan 2024

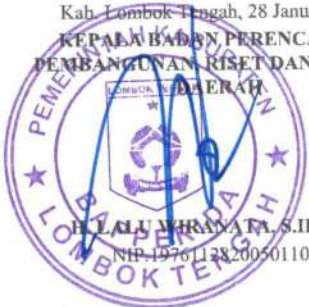


PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	1.079.269.863,00	857.048.306,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(12.463.987.552,59)	(12.220.377.168,00)
RK PPKD	12.404.437.247,25	12.442.598.725,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(86.083.333,34)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(86.083.333,34)	0,00
EKUITAS AKHIR	933.636.224,32	1.079.269.863,00

Kab. Lombok Tengah, 28 Januari 2026
**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH**

H. LALU WIRANATA, S.IP., M.A
NIP.197611282005011006



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2025 dan 2024

BAB I PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan Pemerintahan Negara dan Pembangunan Nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terbagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara dalam Rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan ketentuan pada peraturan-peraturan tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan Pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan bagi BLUD ditambah Laporan Perubahan Anggaran Saldo Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi yang akurat dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan pelaksanaan anggaran untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17/2023, UU No. 1/2004, PP No. 12/2019, PP No. 71/2010, Perda No. 03/2022, Perbub No. 50/2022, Perbub No. 51/2022.

Maksud dari laporan keuangan ini adalah:

- a. *Menunjukkan Transparansi Keuangan:* Menyediakan gambaran yang jelas tentang pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dikelola, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.
- b. *Memperkuat Akuntabilitas:* Memberikan bukti bahwa semua transaksi keuangan telah diproses dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta menunjukkan tanggung jawab pengelola keuangan dalam menjalankan amanah yang diberikan.

- c. *Menggambarkan Kinerja Keuangan*: Menyajikan hasil pencapaian target anggaran, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, untuk memberikan wawasan mengenai efektivitas penggunaan anggaran.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan ini meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut:

- a. *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas*: Laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga semua pemangku kepentingan dapat memahami dan mengevaluasi kinerja keuangan SKPD.
- b. *Memberikan Informasi yang Relevan dan Akurat*: Menyediakan data keuangan yang relevan, akurat, dan lengkap mengenai sumber daya ekonomi, posisi dan kondisi keuangan, perubahan dan potensi keuangan serta realisasi anggaran, aset, kewajiban, dan perubahan ekuitas untuk mendukung analisis dan evaluasi oleh pihak internal dan eksternal.
- c. *Mendukung Pengambilan Keputusan*: Menyajikan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, baik untuk perencanaan anggaran di masa depan maupun untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan saat ini.
- d. *Mematuhi Peraturan dan Standar Akuntansi*: Memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar akuntansi pemerintah, untuk menjaga integritas dan keandalan laporan.
- e. *Menilai Efektivitas Pengelolaan Anggaran*: Menyediakan ikhtisar mengenai pencapaian target anggaran dan evaluasi atas perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut.
- f. *Mencerminkan Kinerja Keuangan*: Menggambarkan hasil dari pengelolaan keuangan selama periode laporan, serta menyajikan informasi yang diperlukan untuk memahami pencapaian dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan anggaran.

Dengan adanya laporan keuangan ini, diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan /ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi keuangan SKPD di Kabupaten Lombok Tengah dan mendukung upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran di masa yang akan datang.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan kegiatan SKPD Kabupaten Lombok Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*);
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Indonesia Nomor 47;

3. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang di haruskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang di perlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Kebijakan Keuangan
- 2.2. Indikator pencapaian target kinerja Keuangan

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.2. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
- 5.3. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR

PENCAPAIAN TARGET IKHTISAR dan KINERJA KEUANGAN

2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2025 disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2024 dan APBD Perubahan disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025.

Terkait dengan Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran setelah Perubahan	Kenalkan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5=4-3	6=(5/3)*100
I	Pendapatan				
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Belanja				
1	Belanja Pegawai	5.912.570.798,41	6.314.503.322,36	401.932.523,95	6,37
2	Belanja Barang dan Jasa	7.185.696.900,99	6.021.541.803,99	(1.164.155.097,00)	(19,33)
3	Belanja Modal	518.129.656,00	450.274.300,00	(67.855.356,00)	(15,07)
	Jumlah Belanja	13.616.397.355,40	12.786.319.426,35	(830.077.929,05)	(6,10)
	Deficit/Surplus	(13.616.397.355,40)	(12.786.319.426,35)	830.077.929,05	6,10

Menyikapi Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan adanya perubahan APBD Tahun 2025 tersebut diatas, beberapa strategi yang ditempuh oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dengan melakukan kebijakan antara lain:

- 1) Upaya penghematan Belanja, dengan melakukan kebijakan antara lain:
 - a. Pembatasan perjalanan dinas dan memprioritaskan kegiatan strategis terkait perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
 - b. Optimalisasi rapat koordinasi dan asistensi perencanaan melalui media daring.
- Ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan menjadi faktor pembatas dalam mewujudkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

- a. Terbatasnya alokasi anggaran yang tersedia dibandingkan dengan meningkatnya kebutuhan kegiatan perencanaan, pengendalian, riset, dan inovasi daerah.
- b. Efisiensi belanja, khususnya belanja perjalanan dinas dan operasional.

2.2 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, dan mendukung berbagai kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kabupaten Lombok Tengah. Semua ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam konteks penganggaran berdasar Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Capaian Program ini Nilai SAKIP OPD. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 7 (Tujuh) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp7.709.905.656,36 terealisasi senilai Rp7.473.309.952,00 atau 96,93%
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Capaian Program ini Persentase Keselarasan Kinerja Program Prioritas OPD dengan Prioritas Daerah dan Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPD. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 4 (Empat) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp1.290.736.993,00 terealisasi senilai Rp1.279.971.613,00 atau 99,17%
- 3) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Capaian Program ini Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Ekonomi dengan RKPD, Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Infrastruktur dengan RKPD, Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang SP2M dengan RKPD, Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra Bidang Ekonomi, Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra Bidang Infrastruktur, dan Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra Bidang SP2M. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 3 (Tiga) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp2.553.231.255,99 terealisasi senilai Rp2.434.489.952,00 atau 95,35%
- 4) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Capaian Program ini Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Inovasi daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 2 (Dua) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp1.232.445.521,00 terealisasi senilai Rp 1.216.665.730,00 atau 98,72%

Ditinjau Dari konteks PP 71 Tahun 2010 terkait penyajian laporan keuangan sesuai SAP, target dan realisasi keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	% dari Anggaran
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
I	Pendapatan				
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Belanja				
1	Belanja Operasi	13.098.267.699,40	12.336.045.126,35	11.958.394.947,25	96,94
1.1	Belanja Pegawai	5.912.570.798,41	6.314.503.322,36	6.110.479.861,25	96,77
1.2	Belanja Barang	7.185.696.900,99	6.021.541.803,99	5.847.915.086,00	97,12
2	Belanja Modal	518.129.656,00	450.274.300,00	446.042.300,00	99,06
2.1	Belanja Modal Peralatan Mesin	518.129.656,00	450.274.300,00	446.042.300,00	99,06
	Jumlah Belanja	13.616.397.355,40	12.786.319.426,35	12.404.437.247,25	97,01

Realisasi Belanja **lebih rendah** dari anggarannya senilai Rp381.882.179,10 atau 2,99%, disebabkan karena adanya

- Perbedaan atau selisih harga barang dan jasa dibandingkan dengan standar harga satuan yang digunakan.
- Efisiensi penggunaan sumber daya.

Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah atas pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam DPA/DPPA tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3. Realisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	7.473.309.952,00	96,93
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input : Dana Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	22 Dokumen	241.989.540,00	99,87

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Outcome : Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Input : Dana Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Outcome : Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31 Dokumen	6.213.749.101,25	96,82
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Input : Dana Output : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Outcome : Laporan Administrasi BMD	4 Dokumen	17.574.000,00	100,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Input : Dana Output : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Outcome : Laporan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	35.010.500,00	99,92

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Input : Dana	12 Dokumen	274.324.429,00	99,95
		Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
		Outcome : Laporan Administrasi Umum Perangkat daerah			
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input : Dana	2 Jenis	531.267.300,00	97,46
		Output : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan, Jumlah Paket Mebel yang Disediakan, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
		Outcome : Barang Milik Daerah yang diadakan			
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input : Dana	2 Jenis	159.395.082,00	89,72
		Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
		Outcome : Barang Milik Daerah Kondisi Baik			
II	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Kinerja Program Prioritas OPD dengan Prioritas Daerah Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPD	100% 100%	1.279.971.613,00	99,17
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Input : Dana	2 Dokumen	963.643.128,00	99,72
		Output : Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik), Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik, Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota, Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan, Jumlah Dokumen Perencanaan			

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
		Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			
		Outcome : Persentase Hasil Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Program Prioritas			
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Input : Dana	3 Dokumen	111.645.300,00	99,95
		Output : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah), Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi			
		Outcome : Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah			
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Input : Dana	3 Dokumen	170.342.685,00	95,49
		Output : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan, Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			
		Outcome : Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah			
4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah	Input : Dana	3 Dokumen	34.340.500,00	100,00
		Output : Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola, Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah, Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			
		Outcome : Dokumen hasil implementasi sistem informasi pemerintahan daerah			
III	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi	Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja	100%	2.434.489.952,00	95,35

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	Perencanaan Pembangunan Daerah	OPD Bidang Ekonomi dengan RKPD Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Infrastruktur dengan RKPD Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang SP2M dengan RKPD Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra Bidang Ekonomi Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra Bidang Infrastruktur Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra Bidang SP2M	100% 100% 100% 100% 100%		
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Input : Dana Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan, Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	8 Dokumen	933.632.867,00	96,55

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia			
		Outcome : Dokumen perencanaan, dokumen monev dan dokumen harmonisasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Input : Dana Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian, Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja	8 Dokumen	831.541.825,00	92,88

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	8 Dokumen	669.315.260,00	96,87
		Outcome : Dokumen perencanaan, dokumen money dan dokumen harmonisasi bidang Perekonomian dan SDA			
		Input : Dana			
		Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur, Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan			
		Outcome : Dokumen perencanaan, dokumen money dan dokumen harmonisasi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
IV	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	1.216.665.730,00	98,72
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Inovasi daerah	23%		
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Input : Dana	2 Dokumen	643.396.790,00	97,67
		Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah			
		Outcome : Dokumen Hasil Kajian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan			
2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Input : Dana	1 Dokumen	573.268.940,00	99,92
		Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			
		Outcome : Dokumen Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi			

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SECARA UMUM

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan masyarakat yang secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati. Pencapaian Kinerja Keuangan tergambar pada pencapaian realisasi anggaran tahun 2025 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2024.

Tabel 3.1. Pencapaian Realisasi Anggaran tahun 2025 dan Perbandingan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2024.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (Rp)		% Tahun 2025	
			Tahun 2025	Tahun 2024	Anggaran	Tahun 2024
1	2	3	4	5	$6=(4/3)*100$	$7=(4-5)/4*100$
A	PENDAPATAN					
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BELANJA					
1	Belanja Operasi	12.336.045.126,35	11.958.394.947,25	11.819.558.725,00	96,94	1,16
2	Belanja Modal	450.274.300,00	446.042.300,00	623.040.000,00	99,06	(39,68)
	Jumlah Belanja	12.786.319.426,35	12.404.437.247,25	12.442.598.725,00	97,01	(0,31)

Dari sisi belanja, terdapat penghematan/efisiensi pengeluaran senilai Rp381.882.179,10 yaitu dari anggaran setelah perubahan senilai Rp12.786.319.426,35 terealisasi Rp12.404.437.247,25 atau 97,01%

Capaian bagian belanja senilai 97,01% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp6.314.503.322,36 terealisasi senilai Rp5.847.915.086,00 atau 96,77%
- b. Belanja Barang dan Jasa, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp6.021.541.803,99 terealisasi senilai Rp5.847.915.086,00 atau 97,12%
- c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp450.274.300,00 terealisasi senilai Rp446.042.300,00 atau 99,06%

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 dari sisi belanja, terjadi penurunan realisasi senilai 0,31%, yaitu Rp12.442.598.725,00 Pada tahun 2024 menjadi Rp12.404.437.247,25 Pada tahun 2025.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam Pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah terdapat hambatan dan Kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut, yaitu:

- a. Kendala terkait dengan efisiensi belanja pegawai

Hal tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya perubahan jumlah pegawai karena adanya pegawai baru yang masuk, pegawai yang pensiun, pegawai yang meninggal, dan sebagainya.
- b. Adanya perubahan komponen gaji dan tunjangan bagi pegawai, seperti penyesuaian pada tunjangan kinerja, tunjangan jabatan/fungsional, gaji pokok, dan sebagainya yang disebabkan oleh adanya perubahan jabatan pegawai, kenaikan gaji berkala, dan sebagainya.

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan, antara lain:

- a. Mengoptimalkan belanja pegawai sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b. Kendala terkait dengan efisiensi belanja barang dan jasa

Hal tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya perubahan harga dan kondisi pasar, sehingga terjadi perbedaan harga dengan standar harga satuan yang digunakan saat perencanaan.
- b. Adanya pengoptimalan penggunaan sumber daya manusia yang ada, sehingga terjadi perbedaan antara realisasi dengan target belanja jasa saat perencanaan.
- c. Adanya efisiensi anggaran belanja barang dan jasa.

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan, antara lain:

- a. Mengoptimalkan belanja barang dan jasa sesuai dengan aturan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi pasar.
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada sebaik mungkin.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi sebaik mungkin untuk mengatasi adanya efisiensi anggaran untuk perjalanan dinas.
- c. Kendala terkait dengan efisiensi belanja modal peralatan dan mesin

Hal tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya perubahan harga dan kondisi pasar, sehingga terjadi perbedaan harga dengan standar harga satuan yang digunakan saat perencanaan.

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan, antara lain:

- a. Mengoptimalkan belanja barang dan jasa sesuai dengan aturan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi pasar.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan sejak tahun 2016 juga telah mengalami perubahan.

4.1 ASUMSI DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. **Asumsi Kemandirian Entitas;**

Bahwa Unit Pemerintah Daerah sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk Menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan asset dan sumberdaya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya program yang telah ditetapkan.

b. **Asumsi Kesenambungan Entitas;**

Berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untuk melakukan likuidasi.

c. **Asumsi Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement);**

Berarti bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang yang digunakan adalah rupiah.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Basis Akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan yang diberlakukan untuk setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. **Basis Kas (cash basis) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran**

Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan

belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

b. Basis AkruaI (Accrual basis) untuk penyusunan Laporan Finansial

Basis AkruaI untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis AkruaI untuk Laporan Operasional, bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan basis AkruaI untuk Neraca, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada Keuangan Daerah, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan **nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah**. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.3.1 Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang liquid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan.

4.3.2 Piutang/Tagihan ke Pihak Ketiga

Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan.

4.3.3 Persediaan

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa perlakuan persediaan sebagai berikut:

- a. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik diakhir periode
- b. Persediaan yang berasal dari pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan

- c. Persediaan yang berasal dari produksi sendiri dinilai berdasarkan biaya standar
- d. Persediaan yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar
- e. Saldo persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian akhir
- f. Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik dan perpetual.
- g. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

4.3.4 Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- b. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- c. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- d. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- e. Berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- f. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian
- g. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap berdasarkan tetap pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.
- h. Pelepasan Aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena pertukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- i. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- j. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

4.3.5 Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

4.3.6 Peralatan dan Mesin

- a. Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat-alat dan mesin sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- b. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- c. Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.3.7 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4.3.8 Jalan, Jaringan dan Instalasi

- a. Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan siap untuk digunakan.
- b. Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap untuk digunakan.
- c. Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun irigasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.

4.3.9 Aset Tetap lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

4.3.10 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data aset lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara pengurus barang Kabupaten Lombok Tengah dengan Bagian Aset Setda

Kabupaten Lombok Tengah, karena aset lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

4.3.11 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

4.3.12 Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain dengan pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca dan LRA. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

A. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi pendapatan antara lain:

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah;
- b. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah;
- c. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- d. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs Tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan;

- e. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar (SiLPA);
- f. Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah yang menjadi beban Daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas Daerah;

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi Belanja antara lain:

- a. Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
 - b. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil-transfer.
 - c. Belanja Operasi diklasifikasikan atas: belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
 - d. Belanja modal diklasifikasikan atas: belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan, penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

B. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah.

I.1. Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar antara lain: Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya, dan Persediaan.

I.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

I.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

I.1.3 Piutang Pajak

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

I.1.4 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan piutang retribusi dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

I.1.5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

I.1.6 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APIP.

I.1.7 Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

I.1.8 Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat senilai biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

I.2. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.

I.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah dan perolehan deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dikapitalisir kembali. Penyertaan modal pemerintah dicatat senilai harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

1.2.2 Investasi Permanen Lainnya-Dana Bergulir

Investasi Permanen Lainnya adalah investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali. Investasi permanen lainnya dicatat senilai harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya. Investasi Dana Bergulir dinilai senilai jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

1.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

1.3.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

1.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

I.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

I.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

I.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan hewan/tanaman. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

I.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat

senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan.

1.4 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah asset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana Cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lin-lain.

1.4.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan asset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

1.4.2 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan senilai nilai perolehannya. Terhadap Aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

II. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

II.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

II.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

II.1.2. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan yaitu adanya pendapatan yang telah diterima oleh SKPD tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca, misalnya jasa giro atas rekening bank setiap bendaharawan uang di SKPD, pendapatan yang diterima oleh Bendaharawan Penerimaan belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.

II.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

III. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

III.1. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

III.2. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang.
- b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- c) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.
- d) Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang.

C. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

2. Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

D. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut.

5.1. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA OPD pada TA 2025 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1. BELANJA

Realisasi belanja daerah yang tertuang dalam perubahan APBD TA 2025 adalah sebesar Rp12.404.437.247,25 mencapai 97,01% dari anggaran belanja daerah TA 2025 sebesar Rp12.786.319.426,35. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Operasi	12.336.045.126,35	11.958.394.947,25	96,94	11.819.558.725,00
2.	Belanja Modal	450.274.300,00	446.042.300,00	99,06	623.040.000,00
Jumlah		12.786.319.426,35	12.404.437.247,25	97,01	12.442.598.725,00

5.1.1.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi TA 2025 terealisasi sebesar Rp11.958.394.947,25 atau mencapai 96,94% dari anggaran Belanja Operasi TA 2025 sebesar Rp12.336.045.126,35. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	6.314.503.322,36	6.110.479.861,25	96,77	5.993.953.943,00
2	Belanja Barang Jasa	6.021.541.803,99	5.847.915.086,00	97,12	5.825.604.782,00
Jumlah		12.336.045.126,35	11.958.394.947,25	96,94	11.819.558.725,00

5.1.1.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2025 terealisasi sebesar Rp6.110.479.861,25 atau mencapai 96,77% dari anggaran Belanja Pegawai TA 2025 sebesar Rp6.314.503.322,36. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian		2025			2024
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai					
	a.	Gaji dan Tunjangan	3,868,691,611.36	3,691,110,695.00	95.41	3,748,613,252.00
		1 Belanja Gaji Pokok ASN	2,911,376,841.36	2,743,440,268.00	94.23	2,720,016,341.00
		Belanja Gaji Pokok PNS	2,911,376,841.36	2,743,440,268.00	94.23	2,720,016,341.00
		2 Belanja Tunjangan Keluarga ASN	294,236,754.00	292,913,754.00	99.55	292,907,080.00
		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	294,236,754.00	292,913,754.00	99.55	292,907,080.00
		3 Belanja Tunjangan Jabatan ASN	105,430,000.00	104,230,000.00	98.86	106,990,000.00
		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	105,430,000.00	104,230,000.00	98.86	106,990,000.00
		4 Belanja Tunjangan Fungsional ASN	308,480,000.00	305,825,000.00	99.14	400,197,000.00
		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	308,480,000.00	305,825,000.00	99.14	400,197,000.00
		5 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	60,290,000.00	59,535,000.00	98.75	61,980,000.00
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	60,290,000.00	59,535,000.00	98.75	61,980,000.00
		6 Belanja Tunjangan Beras ASN	156,308,160.00	155,558,160.00	99.52	158,889,480.00
		Belanja Tunjangan Beras PNS	156,308,160.00	155,558,160.00	99.52	158,889,480.00
		7 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	32,528,674.00	29,572,719.00	90.91	7,596,477.00
		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	32,528,674.00	29,572,719.00	90.91	7,596,477.00
		8 Belanja Pembulatan Gaji ASN	41,182.00	35,794.00	86.92	36,874.00
		Belanja Pembulatan Gaji PNS	41,182.00	35,794.00	86.92	36,874.00
	b.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2,445,811,711.00	2,419,369,166.25	98.92	2,242,106,691.00
		1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2,445,811,711.00	2,419,369,166.25	98.92	2,242,106,691.00
	c.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0.00	0.00	0.00	3,234,000.00
		1 Belanja Honorarium	0.00	0.00	0.00	3,234,000.00
		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0.00	0.00	0.00	3,234,000.00
	Jumlah		6,314,503,322.36	6,110,479,861.25	96.77	5,993,953,943.00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2025 dan realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Perubahan jumlah pegawai, baik karena adanya pegawai baru, mutasi masuk dan keluar, pensiun, maupun pegawai yang berhenti, sehingga mempengaruhi kebutuhan anggaran dan realisasi belanja pegawai.
2. Perubahan komponen penghasilan pegawai, seperti penyesuaian gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, atau tunjangan lainnya yang tidak sepenuhnya terealisasi sesuai anggaran.

5.1.1.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2025 terealisasi sebesar Rp5.847.915.086,00 atau mencapai 97,12% dari anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2025 sebesar Rp6,021,541,803.99. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Barang Jasa				
1	Belanja Barang	2,595,108,523.99	2,541,680,650.00	97.94	2,549,324,440.00
	a. Belanja Bahan Pakai Habis	2,595,108,523.99	2,541,680,650.00	97.94	2,549,324,440.00
2	Belanja Jasa	2,826,967,280.00	2,707,678,782.00	95.78	1,799,097,071.00
	a. Belanja Jasa Kantor	2,668,645,040.00	2,566,620,542.00	96.18	1,562,507,071.00
	b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1,458,240.00	1,458,240.00	100.00	1,440,000.00
	c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	40,464,000.00	40,000,000.00	98.85	55,000,000.00
	d. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	116,400,000.00	99,600,000.00	85.57	180,150,000.00
3	Belanja Pemeliharaan	78,000,000.00	78,000,000.00	100.00	38,000,000.00
	a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	78,000,000.00	78,000,000.00	100.00	38,000,000.00
4	Belanja Perjalanan Dinas	433,966,000.00	433,055,654.00	99.79	1,424,683,271.00
	a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	433,966,000.00	433,055,654.00	99.79	1,424,683,271.00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	87,500,000.00	87,500,000.00	100.00	14,500,000.00
	a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	87,500,000.00	87,500,000.00	100.00	14,500,000.00
	Jumlah	6,021,541,803.99	5,847,915,086.00	97.12	5,825,604,782.00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2025 dan realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Penyesuaian dan efisiensi anggaran, sebagai tindak lanjut kebijakan penghematan belanja daerah yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan.
2. Perubahan harga satuan dan standar biaya, baik akibat kondisi pasar maupun penyesuaian regulasi, yang mempengaruhi nilai realisasi belanja dibandingkan dengan anggaran.

5.1.1.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp446.042.300,00 atau mencapai 99,06% dari anggaran Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp450.274.300,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Peralatan dan Mesin	450.274.300,00	446.042.300,00	99,06	623.040.000,00
	Jumlah	450.274.300,00	446.042.300,00	99,06	623.040.000,00

Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut.

5.1.1.2.1. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2025 di realisasikan sebesar Rp446.042.300,00 atau mencapai 99,06% dari anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 20XX sebesar Rp450.274.300,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.6. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Peralatan dan Mesin				
1	Belanja Modal Alat Angkutan	0.00	0.00	0.00	316,760,000.00
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0.00	0.00	0.00	316,760,000.00
	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0.00	0.00	0.00	73,760,000.00
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0.00	0.00	0.00	243,000,000.00
2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	262,639,150.00	260,055,000.00	99.02	116,900,000.00
	Belanja Modal Alat Kantor	0.00	0.00	0.00	16,800,000.00
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0.00	0.00	0.00	16,800,000.00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	262,639,150.00	260,055,000.00	99.02	100,100,000.00
	Belanja Modal Mebel	69,027,150.00	68,275,000.00	98.91	50,100,000.00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	193,612,000.00	191,780,000.00	99.05	50,000,000.00
3	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	49,907,760.00	49,620,500.00	99.42	4,000,000.00
	Belanja Modal Alat Studio	49,907,760.00	49,620,500.00	99.42	4,000,000.00
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	24,147,760.00	23,920,500.00	99.06	0.00
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	25,760,000.00	25,700,000.00	99.77	4,000,000.00
4	Belanja Modal Alat Laboratorium	804,320.00	800,000.00	99.46	0.00
	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	804,320.00	800,000.00	99.46	0.00
	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	804,320.00	800,000.00	99.46	0.00
5	Belanja Modal Komputer	136,923,070.00	135,566,800.00	99.01	185,380,000.00
	Belanja Modal Komputer Unit	73,284,130.00	72,496,000.00	98.92	164,565,000.00
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	73,284,130.00	72,496,000.00	98.92	164,565,000.00
	Belanja Modal Peralatan Komputer	63,638,940.00	63,070,800.00	99.11	20,815,000.00
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	63,638,940.00	63,070,800.00	99.11	20,815,000.00
	J u m l a h	450,274,300.00	446,042,300.00	99.06	623,040,000.00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

1. Perbedaan volume dan jenis pengadaan dibandingkan tahun sebelumnya, yang menyebabkan adanya kenaikan atau penurunan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2. Perubahan spesifikasi teknis dan harga satuan barang, yang mempengaruhi nilai kontrak dan besaran realisasi dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan

5.1.2. SURPLUS/(DEFISIT)-LRA

Realisasi Belanja TA 2025 sebesar Rp12.404.437.247,25, sehingga terjadi Defisit realisasi APBD sebesar (Rp12.404.437.247,25) atau 97,01% dari anggaran sebesar (Rp12.786.319.426,35) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.7. Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) LRA

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja	12,786,319,426.35	12,404,437,247.25	97.01	12,442,598,725.00
Surplus/ (Defisit)		(12,786,319,426.35)	(12,404,437,247.25)	97.01	(12,442,598,725.00)

5.2. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan OPD Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

5.2.1. ASET

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp934.193.364,32 dan Rp1.243.579.370,00 Berikut daftar rincian saldo Aset:

Tabel 5.8. Rincian Aset

No	Uraian	31-Des-25	31-Des-24
		(Rp)	(Rp)
1	Aset Lancar	5.642.000,00	930.000,00
2	Aset Tetap	928.551.364,32	1.242.649.370,00
3	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
4	Properti Investasi	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	934.193.364,32	1.243.579.370,00

Berikut rincian per item aset.

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, Piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp5.642.000,00 dan Rp930.000,00 Berikut daftar rincian Aset Lancar:

Tabel 5.9. Rincian Aset Lancar

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Kas dan setara Kas	0,00	0,00
2	Persediaan	5.642.000,00	930.000,00
	Jumlah	5.642.000,00	930.000,00

Berikut ini adalah rincian aset lancar.

5.2.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau simpanan bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya dicatat sebesar nilai rupiahnya.

Saldo Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00

Berikut rincian Kas dan Setara Kas:

Tabel 5.10. Rincian Kas dan Setara Kas

No	Uraian	31-Des-25	31-Des-24
		(Rp)	(Rp)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.2.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang menjadi tanggungjawab/dikelola oleh bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP).

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.11. Uraian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Ket	Sisa Kas		Tgl Setor ke Kas Daerah/SPJ/ dan NO STS
		Bank	Tunai	
1	Sisa UP	0,00	0,00	Tanggal Setor: 30 Desember 2025 No. STS: 0005/Bapperida-STs/2025
	Jumlah	0,00	0,00	

5.2.1.1.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp5.642.000,00 dan Rp930.000,00 Persediaan tersebut merupakan persediaan barang pakai habis yang masih tersisa di SKPD berdasarkan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berikut rinciannya.

Tabel 5.12. Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	5.642.000,00	930.000,00
	Jumlah	5.642.000,00	930.000,00

5.2.1.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap setelah penyusutan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp928.551.364,32 dan Rp1.242.649.370,00 Saldo Aset Tetap terdiri dari:

Tabel 5.13. Daftar Nilai Aset Tetap

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	6.338.569.002,17	6.009.236.702,17
2	Gedung dan Bangunan	163.000.000,00	163.000.000,00
3	Aset Tetap Lainnya	14.910.000,00	14.910.000,00
	Jumlah Aset Tetap sebelum penyusutan	1.688.691.670,00	1.242.649.370,00
4	Akumulasi Penyusutan	(5.587.927.637,85)	(4.944.497.332,17)
	Jumlah Bersih	928.551.364,32	1.242.649.370,00

Rincian Aset Tetap berdasarkan objek Aset Tetap Per 31 Desember 2025 sebagai berikut;

5.2.1.2.1 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebelum penyusutan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp6.455.279.002,17 dan Rp6.009.236.702,17 Rincian aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.14. Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Nilai Per 31 Desember 2025	Nilai Per 31 Desember 2024
1.3.2	Peralatan Dan Mesin	6.338.569.002,17	6.009.236.702,17
1.3.2.02	Alat Angkutan	2.433.753.850,00	2.433.753.850,00
1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	31.000.000,00	31.000.000,00
1.3.2.04	Alat Pertanian	9.723.750,00	9.723.750,00
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.838.475.752,16	1.695.130.752,16
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	385.851.600,01	336.231.100,01
1.3.2.08	Alat Laboratorium	7.150.000,00	6.350.000,00
1.3.2.09	Alat Persenjataan	19.000.000,00	19.000.000,00
1.3.2.10	Komputer	1.613.614.050,00	1.478.047.250,00

Peningkatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp446.042.300,00 dan pengurangan senilai Rp116.710.000,00 di sajikan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 5.15. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	6.009.236.702,17
II	Penambahan	
1	Belanja Modal TA 2025	446.042.300,00
	Jumlah Mutasi Tambah	446.042.300,00
III	Pengurangan	
1	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	89.910.000,00
2	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Barang Pakai Habis-Extracomptable	26.800.000,00
	Jumlah Mutasi Kurang	116.710.000,00
IV	Saldo Akhir	6.338.569.002,17

5.2.1.2.2 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Termasuk dalam bangunan dan gedung adalah teralis yang digunakan untuk sarana pendukung gedung tersebut.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp163.000.000,00 dan Rp163.000.000,00 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel : 5.16. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Nilai Per 31 Desember 2025	Nilai Per 31 Desember 2024
1.3.3	Gedung Dan Bangunan	163.000.000,00	163.000.000,00
1.3.3.01	Bangunan Gedung	163.000.000,00	163.000.000,00

5.2.1.2.3 Aset Tetap Lainnya.

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp14.910.000,00 dan Rp14.910.000,00. Rincian aset tetap lainnya per 31 Desember 2025 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5.17. Aset Tetap Lainnya

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Lainnya	Nilai Per 31 Desember 2025	Nilai Per 31 Desember 2024
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	14.910.000,00	14.910.000,00
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	11.035.000,00	11.035.000,00
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	3.875.000,00	3.875.000,00

Faktor Penyebab Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap lainnya sebagaimana dalam tabel berikut:

5.2.1.2.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyusutan Aset Tetap. Saldo Penyusutan aset tetap Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai (Rp5,587,927,637.85) dan (Rp4.944.497.332,17).

5.2.1.3 Aset Lainnya

Saldo bersih Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.2.1.4 Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk: digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Netto Aset Tetap Properti Investasi Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 . Properti Investasi di rinci sebagai berikut:

5.2.2 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban di klasifikasi menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Nilai Kewajiban Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp557.140,00 dan Rp 164.309.507,00 Rincian kewajiban sebagai berikut.

Tabel 5.18. Rincian Kewajiban

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	557.140,00	164.309.507,00
	Jumlah	557.140,00	164.309.507,00

5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Posisi kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp557.140,00 dan Rp164.309.507,00 Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

Tabel 5.19. Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Utang Belanja	557.140,00	164.309.507,00
	Jumlah	557.140,00	164.309.507,00

5.2.2.1.1 Utang Belanja dan Transfer

Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp557.140,00 dan Rp164.309.507,00. Utang Belanja dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.20. Rincian Utang Belanja

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31-Des-2024 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	557.140,00	164.309.507,00
	Total	557.140,00	164.309.507,00

5.2.2.1.1.1 Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp557.140,00 dan Rp164.309.507,00 Berikut rincian utang belanja pegawai.

Tabel 5.21. Rincian Utang Belanja Pegawai

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31-Des-2024 (Rp)
1	Utang Gaji dan Tunjangan	557.140,00	4.644.288,00
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan	0,00	159.665.219,00
	Total	557.140,00	164.309.507,00

5.2.3 EKUITAS

Nilai ekuitas akhir Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp933.636.224,32 dan Rp1.079.269.863,00. Nilai ekuitas menurun senilai Rp145.633.638,68 atau sebesar 15,60% di bandingkan dengan saldo nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2025 yang sebesar Rp933.636.224,32. Selain itu Nilai ekuitas dan kewajiban akhir Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp934.193.364,32 dan Rp1.243.579.370,00. Nilai ekuitas menurun senilai Rp309.386.005,68 atau sebesar 33,12% di bandingkan dengan saldo nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2025 yang sebesar Rp934.193.364,32.

5.3. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp12.463.987.552,59 dan Rp12.220.377.168,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Beban yang diakui oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.22. Rincian Beban

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban	12.463.987.552,59	12.220.377.168,00
Jumlah		12.463.987.552,59	12.220.377.168,00

5.3.1.1 OPERASIONAL

Beban Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp12.463.987.552,59 dan Rp12.220.377.168,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.23. Rincian Beban Operasional

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Beban Pegawai	5.946.727.494,25	5.983.488.794,00
2	Beban Barang dan Jasa	5.959.913.086,00	5.826.304.782,00
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	557.346.972,34	410.583.592,00
Jumlah		12.463.987.552,59	12.220.377.168,00

5.3.1.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk tahun 2025 dan 2024 senilai Rp5.946.727.494,25 dan Rp5.983.488.794,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.24. Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.687.023.547,00	3.744.714.276,00
a.	Beban Gaji Pokok ASN	2.739.656.008,00	2.716.103.661,00
b.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	292.619.610,00	292.912.332,00
c.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	104.230.000,00	106.990.000,00
d.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	305.825.000,00	400.197.000,00
e.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	59.535.000,00	61.980.000,00
f.	Beban Tunjangan Beras ASN	155.558.160,00	158.889.480,00
g.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	29.564.242,00	7.604.954,00
h.	Beban Pembulatan Gaji ASN	35.527,00	36.849,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.259.703.947,25	2.235.540.518,00
a.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.259.703.947,25	2.235.540.518,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	3.234.000,00
a.	Beban Honorarium	0,00	3.234.000,00
	Jumlah	5.946.727.494,25	5.983.488.794,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - Adanya perubahan jumlah pegawai.
 - Adanya perubahan atau penyesuaian gaji dan tunjangan pegawai.
- Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2025 sebesar Rp163.752.367,00 (Rp5.946.727.494,25 - Rp6.110.479.861,25). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.25. Penjelasan Selisih Beban Pegawai LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	163.752.367,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban LO:	
Utang Belanja Pegawai Tahun Berkenaan (N)	0,00
Utang Gaji dan Tunjangan	557.140,00
Utang Tambahan Penghasilan PNS	0,00
Pengurangan Beban LO:	
Utang Belanja Pegawai (N-1)	
Utang Gaji dan Tunjangan	4.644.288,00
Utang Tambahan Penghasilan PNS	159.665.219,00
Jumlah Penjelasan Selisih	163.752.367,00

- Adanya selisih beban pegawai antara LRA dengan LO ini terjadi karena adanya pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan pegawai serta tambahan penghasilan PNS atas tahun sebelumnya yang dibayarkan di tahun 2025, adapun rinciannya adalah Rp4.341.400,00 untuk gaji pokok PNS, Rp294.144,00 untuk tunjangan keluarga PNS, Rp8.477,00 untuk tunjangan PPH/tunjangan khusus

PNS, dan Rp267,00 untuk pembulatan gaji PNS, serta adanya kekurangan gaji pokok PNS bulan Desember 2025 yang akan dibayarkan pada tahun 2026 senilai Rp557.140,00.

5.3.1.1.2 Beban Barang dan Jasa

Nilai beban barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 masing senilai Rp5.959.913.086,00 dan Rp5.826.304.782,00. Rincian Nilai Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.26. Rincian Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
A	Beban Barang		
1	Beban Barang Pakai Habis	2.563.768.650,00	2.550.024.440,00
2	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	89.910.000,00	
B	Beban Jasa		
1	Beban Jasa Kantor	2.566.620.542,00	1.562.507.071,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	1.458.240,00	1.440.000,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	55.000.000,00
4	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	99.600.000,00	180.150.000,00
C	Beban Pemeliharaan		
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	78.000.000,00	38.000.000,00
D	Beban Perjalanan Dinas		
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	433.055.654,00	1.424.683.271,00
E	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	87.500.000,00	14.500.000,00
	Jumlah	5.959.913.086,00	5.826.304.782,00

Belanja Barang dan Jasa – LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp5.959.913.086,00, Sedangkan Realisasi Beban Barang dan Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp5.826.304.782,00.

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - Adanya perubahan atau penyesuaian harga barang dan jasa.
 - Adanya perbedaan kebutuhan barang dan jasa untuk operasional.
- Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2025 ini **lebih kecil** dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2025 sebesar Rp111.998.000,00 (Rp5.959.913.086,00 - Rp5.847.915.086,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.27. Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa-LO

No	Uraian	Nilai
1	Selisih LO – LRA	111.998.000,00
	Penjelasan Selisih:	
2	Penambahan Beban LO:	
A	Penggunaan Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)	930.000,00
B	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	89.910.000,00
C	Reklas dari Aset Tetap-Brg Pakai Habis dan Reklas dari aset Tetap-Extracomtable	26.800.000,00
3	Pengurangan Beban LO:	
A	Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	5.642.000,00
	Jumlah Penjelasan Selisih	111.998.000,00

3. Adanya selisih beban barang dan jasa antara LRA dengan LO ini terjadi karena adanya persediaan berupa alat tulis kantor di tahun sebelumnya yang digunakan pada tahun 2025 senilai Rp930.000,00 dan adanya persediaan berupa alat tulis kantor per 31 Desember 2025 yang akan digunakan di tahun berikutnya senilai Rp5.642.000,00. Selain itu, terdapat beban aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi berupa Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) senilai Rp89.910.000,00 dan Reklas dari Aset Tetap-Brg Pakai Habis dan Reklas dari aset Tetap-Extracomtable berupa Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak senilai Rp26.800.000,00.

5.3.1.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2025 dan 2024 senilai masing-masing Rp557.346.972,34 dan Rp 410.583.592,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.28. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	564.086.972,34	407.552.914,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.260.000,00	3.030.678,00
Jumlah	557.346.972,34	410.583.592,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - Adanya penambahan dan/atau pengurangan aset tetap.
 - Adanya penambahan beban penyusutan dan amortisasi aset.
- Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2025 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca per 31 Desember 2025 diungkapkan dalam CaLK.

5.3.2 SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Berdasarkan Pendapatan dan Beban Operasional yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui Surplus Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai masing-masing Rp12.463.987.552,59 dan Rp12.220.377.168,00 terdiri dari:

Tabel 5.29. Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pendapatan-LO	0,00	0,00
2	Beban-LO	12.463.987.552,59	12.220.377.168,00
	Surplus/(Defisit) Operasional	(12.463.987.552,59)	(12.220.377.168,00)

5.3.3. SURPLUS/(DEFISIT) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2025 dan 2024 yang dihitung dari:

Tabel 5.30. Rincian Surplus/(Defisit) – LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kegiatan Operasional		
➤ Pendapatan Daerah – LO	0,00	0,00
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	0,00	0,00
➤ Beban Operasional	12.463.987.552,59	12.220.377.168,00
✓ Beban Operasional	12.463.987.552,59	12.220.377.168,00
Surplus/(Defisit) dari kegiatan Operasional	(12.463.987.552,59)	(12.220.377.168,00)
Jumlah	(12.463.987.552,59)	(12.220.377.168,00)

5.4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1. Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.31. Ekuitas Awal - LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Ekuitas Awal	1.079.269.863,00	857.048.306,00

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2024 dan 2023 pada **Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah** yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.4.2. Surplus/(Defisit)-LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.32. Surplus/(Defisit)-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	(12.463.987.552,59)	(12.220.377.168,00)
Surplus/(Defisit) - LO	(12.463.987.552,59)	(12.220.377.168,00)

Pada Tahun 2025 dan 2024 **Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah** masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan non operasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 202N. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada *point* 5.3.3.

5.4.3. R/K PPKD

Akun R/K PPKD digunakan untuk mencatat ekuitas pemerintah daerah yang berada dan dicatat pada setiap SKPD untuk dikonsolidasikan. Nilai R/K PPKD yang akan dikonsolidasikan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp12.404.437.247,25 dan Rp12.442.598.725,00.

5.4.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

Tabel 5.33. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan Mendasar

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Ekuitas – Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas – Aset Tetap	86.083.333,34	0,00
Koreksi Ekuitas – Lain-Lain	0,00	0,00
Total	86.083.333,34	0,00

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2025 harus dilakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang signifikan mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban diantaranya yaitu:

5.4.4.1. Koreksi Ekuitas Nilai Persediaan

Koreksi Ekuitas Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.4.2 Koreksi Ekuitas - Aset Tetap

Koreksi Ekuitas Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp86.083.333,34 sebagai kurang saji dan senilai Rp0,00 sebagai kurang saji.

Tabel 5.34. Koreksi Ekuitas Aset Tetap

No.	Uraian	Koreksi 2025	Koreksi 2024
A	Koreksi Nilai Aset Tetap		
B	Koreksi Nilai Akumulasi penyusutan Aset Tetap		
1	Koreksi akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin	86.083.333,34	0,00
	Total	86.083.333,34	0,00

Untuk periode tahun 2025, terdapat koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp86.083.333,34.

5.4.4.3. Koreksi Ekuitas – Lain-lain

Koreksi Ekuitas Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 senilai total Rp0,00 sebagai lebih saji.

5.4.5 Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Per 31 Desember 2025 dan 2024.

Tabel 5.35. Rincian Ekuitas Akhir

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Ekuitas Akhir	933.636.224,32	1.079.269.863,00

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah berperan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan dengan beban kerja besar. Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 46 Tahun 2022, yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di jelaskan di atas, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan bidang riset dan inovasi daerah.

6.2. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Tabel 6.1. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

No	SDM OPD		Jumlah
1	Jenis	PNS	47
2	Golongan Ruang	III/A	12
		III/B	3
		III/C	5
		III/D	13
		IV/A	11
		IV/B	3
3	Tingkat Pendidikan	SMA/ sederajat	7
		DIV/S1	26
		S2	14
4	Jabatan	Kepala Badan	1
		Sekretaris Badan	1
		Kepala Bidang	3
		Kepala Sub Bagian	1
		Perencana Ahli Madya	5
		Perencana Ahli Muda	12
		Perencana Ahli Pertama	1
		Analisis Kebijakan Ahli Muda	1
		Statistisi Ahli Pertama	1
		Pengolah Data dan Informasi	3
		Penelaah Teknis Kebijakan	12
		Pengadministrasi Perkantoran	6

BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan CALK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 secara keseluruhan.

Kab. Lombok Tengah, 28 Januari 2026

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,


(H. LALU WIRANATA, SIP, MA.)
NIP. 197611282005011006



**PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN TH 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
Jalan Raden Pugu Komplek Kantor Bupati Lombok Tengah Gedung C Lantai 3

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **2025**, telah dilakukan Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, dengan perhitungan kas sebagai berikut :

Saldo buku yang ditetapkan		
Penerimaan periode 1 Januari s/d 31 Des 2025	Rp 12.631.669.698,25	
Pengeluaran periode sama	Rp 12.631.669.698,25	
Saldo buku		Rp 0,00

Saldo kas Bendahara Pengeluaran, terdiri dari		
Uang tunai di brankas	Rp 0,00	
Uang kertas	Rp 0,00	
Uang logam	Rp 0,00	
Uang di rekening		Rp 0,00
Jumlah kas		Rp 0,00
Selisih kas		Rp 0,00

Penjelasan atas selisih kas
Catatan :

RINCIAN UANG TUNAI

Terdiri dari

1. Uang Kertas	0 lembar	@ Rp	0,00	Rp	0,00
			TOTAL	Rp	0,00
2. Uang Logam	0 keping	@ Rp	0,00	Rp	0,00
			TOTAL	Rp	0,00

Bendahara Pengeluaran
Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Lombok Tengah

(**MIRNASARI, SOS**)
NIP. 198602142005012003

Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Lombok Tengah

(**H. LALU WIRANATA, S.IP, MA**)
NIP. 197611282005011006



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
Jalan Raden Puguuh Komplek Kantor Bupati Lombok Tengah Gedung C Lantai 3

BERITA ACARA PEMERIKSAAN STOCK OPNAME BARANG HABIS PAKAI

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **2025** kami yang bertandatangan dibawah ini

Nama Lengkap : H. LALU WIRANATA, S.IP, MA
NIP : 197611282005011006
Jabatan : Pengguna Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007, kami melakukan pemeriksaan terhadap persediaan barang habis pakai kepada :

Nama Lengkap : L. MAMAN NURRAHMAN
NIP : 198003262008011011
Jabatan : Bendahara Barang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut, jumlah barang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Map Kop Dinas	34	Buah	25.000	850.000
2.	Box File	14	Buah	10.000	140.000
3.	Amplop Dinas	70	Pack	50.000	3.500.000
4.	Kertas F4 Warna Kuning	6	Rim	40.000	240.000
5.	Kertas F4 Warna Merah	4	Rim	40.000	160.000
6.	Map Coklat	1	Pack	40.000	40.000
7.	Map Ordener	2	Buah	20.000	40.000
8.	Paper Clip Kecil	120	Kotak	1.500	180.000
9.	Paper Clip Besar	40	Kotak	5.000	200.000
10.	Binder Clip	48	Kotak	5.000	240.000
11.	Map Plastik	26	Buah	2.000	52.000
	TOTAL				5.642.000

Bendahara Barang


(L. MAMAN NURRAHMAN)
NIP. 198003262008011011

Praya, 31 Desember 2025


Yang memeriksa/
Pengguna Anggaran,
(H. LALU WIRANATA, S.IP, MA)
NIP. 197611282005011006

BERITA ACARA REKONSILIASI

Pada hari ini **Rabu** tanggal **28** bulan **Januari** tahun **2026** telah disenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas dan Neraca antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) yang selanjutnya disebut pengguna Anggaran, dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku SKPKD, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah/PPKD. Pengguna Anggaran telah menyampaikan laporan/data sebagai bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Sampai Dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2025
2. Laporan Operasional Sampai Dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2025
3. Laporan Perubahan Ekuitas Per Tanggal 31 Desember 2025
4. Neraca Per Tanggal 31 Desember 2025

Selanjutnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Selaku SKPKD menyediakan data transaksi dan laporan terkait yang diproses berdasarkan SP2D/STS dan bukti transaksi keuangan lainnya yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Kesalahan / ketidakcocokkan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, akan dijadikan dasar perbaikan terhadap data dan laporan keuangan di kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



WIDYA ASTUTI, SE., M.Si.
NIP. 197503022000032006

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah
/Pengguna Anggaran



H. LALU WIRANATA S.IP., M.A.
NIP. 197611282005011006

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LRA
BULAN DESMBER
TAHUN ANGGARAN 2025

No Urut	Uraian / Rincian Pos-pos LRA	LRA Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LRA Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
5	BELANJA DAERAH	12.404.437.247,25	12.404.437.247,25	0,00	0,00	0,00	12.404.437.247,25
5.1	BELANJA OPERASI	11.958.394.947,25	11.958.394.947,25	0,00	0,00	0,00	11.958.394.947,25
5.1.01	Belanja Pegawai	6.110.479.861,25	6.110.479.861,25	0,00	0,00	0,00	6.110.479.861,25
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.847.915.086,00	5.847.915.086,00	0,00	0,00	0,00	5.847.915.086,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	11.958.394.947,25	11.958.394.947,25	0,00	0,00	0,00	11.958.394.947,25
5.2	BELANJA MODAL	446.042.300,00	446.042.300,00	0,00	0,00	0,00	446.042.300,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	446.042.300,00	446.042.300,00	0,00	0,00	0,00	446.042.300,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	446.042.300,00	446.042.300,00	0,00	0,00	0,00	446.042.300,00
	JUMLAH BELANJA	12.404.437.247,25	12.404.437.247,25	0,00	0,00	0,00	12.404.437.247,25
	SURPLUS/ DEFISIT	(12.404.437.247,25)	(12.404.437.247,25)	0,00	0,00	0,00	(12.404.437.247,25)

Praya, 28 Januari 2026

a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan


WIDYA ASTUTI, SE., M.Si.
 NIP. 197503022000032006

Praya, 28 Januari 2026

a.n Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
 Riset dan Inovasi Daerah / Pengguna Anggaran


H. LALU WIRANATA, S.P., M.A.
 NIP. 197612282005011006

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI NERACA
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2025

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos Neraca	NERACA Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		NERACA Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
1	ASET	934.193.364,32	934.193.364,32	0,00	0,00	0,00	934.193.364,32
1.1	ASET LANCAR	5.642.000,00	5.642.000,00	0,00	0,00	0,00	5.642.000,00
1.1.12	Persediaan	5.642.000,00	5.642.000,00	0,00	0,00	0,00	5.642.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	5.642.000,00	5.642.000,00	0,00	0,00	0,00	5.642.000,00
1.3	ASET TETAP	928.551.364,32	928.551.364,32	0,00	0,00	0,00	928.551.364,32
1.3.02	Peralatan dan Mesin	6.338.569.002,17	6.338.569.002,17	0,00	0,00	0,00	6.338.569.002,17
1.3.03	Gedung dan Bangunan	163.000.000,00	163.000.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	14.910.000,00	14.910.000,00	0,00	0,00	0,00	14.910.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(5.587.927.637,85)	(5.587.927.637,85)	0,00	0,00	0,00	(5.587.927.637,85)
	JUMLAH ASET TETAP	928.551.364,32	928.551.364,32	0,00	0,00	0,00	928.551.364,32
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	934.193.364,32	934.193.364,32	0,00	0,00	0,00	934.193.364,32
2	KEWAJIBAN	557.140,00	557.140,00	0,00	0,00	0,00	557.140,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	557.140,00	557.140,00	0,00	0,00	0,00	557.140,00
2.1.06	Utang Belanja	557.140,00	557.140,00	0,00	0,00	0,00	557.140,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	557.140,00	557.140,00	0,00	0,00	0,00	557.140,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	557.140,00	557.140,00	0,00	0,00	0,00	557.140,00
3	EKUITAS	933.636.224,32	933.636.224,32	0,00	0,00	0,00	933.636.224,32
3.1	EKUITAS	933.636.224,32	933.636.224,32	0,00	0,00	0,00	933.636.224,32
3.1.01	Ekuitas	(11.470.801.022,93)	(11.470.801.022,93)	0,00	0,00	0,00	(11.470.801.022,93)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	12.404.437.247,25	12.404.437.247,25	0,00	0,00	0,00	12.404.437.247,25
	JUMLAH EKUITAS	933.636.224,32	933.636.224,32	0,00	0,00	0,00	933.636.224,32
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	934.193.364,32	934.193.364,32	0,00	0,00	0,00	934.193.364,32

Praya, 28 Januari 2026

a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

a.n Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah / Pengguna Anggaran


WIDYA ASTUTI, SE., M.Si.
 NIP. 197503022000032006


H. LULU WIRANATA, S.P., M.A.
 NIP. 197611282005011006

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN OPERASIONAL
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2025

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos LO	LO Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LO Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
8	BEBAN	12.463.987.552,59	12.463.987.552,59	0,00	0,00	0,00	12.463.987.552,59
8.1	BEBAN OPERASI	11.906.640.580,25	11.906.640.580,25	0,00	0,00	0,00	11.906.640.580,25
8.1.01	Beban Pegawai	5.946.727.494,25	5.946.727.494,25	0,00	0,00	0,00	5.946.727.494,25
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	5.959.913.086,00	5.959.913.086,00	0,00	0,00	0,00	5.959.913.086,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	11.906.640.580,25	11.906.640.580,25	0,00	0,00	0,00	11.906.640.580,25
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	557.346.972,34	557.346.972,34	0,00	0,00	0,00	557.346.972,34
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	557.346.972,34	557.346.972,34	0,00	0,00	0,00	557.346.972,34
	JUMLAH BEBAN	12.463.987.552,59	12.463.987.552,59	0,00	0,00	0,00	12.463.987.552,59
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(12.463.987.552,59)	(12.463.987.552,59)	0,00	0,00	0,00	(12.463.987.552,59)

a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan


WIDYA ASTUTI, SE., M.Si.
 NIP. 197503022000032006

Praya, 28 Januari 2026

a.n Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
 Riset dan Inovasi Daerah / Pengguna Anggaran


H. LALE WIRANATA, S.P., M.A.
 NIP. 197611282005011006

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2025

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos LPE	LPE Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LPE Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
	EKUITAS AWAL	1.079.269.863,00	1.079.269.863,00	0,00	0,00	0,00	1.079.269.863,00
	SURPLUS / (DEFISIT) – LO	(12.463.987.552,59)	(12.463.987.552,59)	0,00	0,00	0,00	(12.463.987.552,59)
	RK PPKD	12.404.437.247,25	12.404.437.247,25	0,00	0,00	0,00	12.404.437.247,25
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	(86.083.333,34)	(86.083.333,34)	0,00	0,00	0,00	(86.083.333,34)
	LAIN-LAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EKUITAS AKHIR	933.636.224,32	933.636.224,32	0,00	0,00	0,00	933.636.224,32

a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan


WIDYA ASTUTI, SE., M.Si.
 NIP. 197503022000032006

Praya, 28 Januari 2026

a.n Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
 Riset dan Inovasi Daerah / Pengguna Anggaran


H. LULU WIRANATA, S.IP., M.A.
 NIP. 197611282005011006

[illegible]

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

003 0032100706000 201 IDR 227,232,451 K
003 003001010401010360 IDR 227,232,451 D
RKUD Kab. Lombok Tengah 0005/bapperid
a-sts/2025 sisa UP 30/12/2025 10:41:19

(STS)

Bank : PT BANK NTB SYARI'AH

No. rekening : 003.21.00706.000

STS No : 0005/Bapperida-STs/2025

Harap diterima uang sebesar
(dengan huruf)

: Rp. 227.232.451,-
: Dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima
puluh satu rupiah

Untuk pembayaran

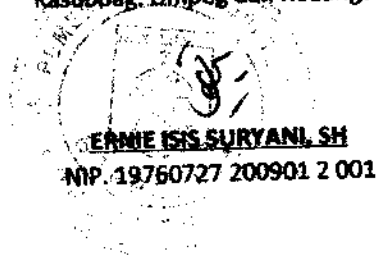
: STS sisa UP Bapperida Kab. Lombok Tengah TA. 2025

NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH
		STS UP	227.232.451
		Jumlah	227.232.451

Uang tersebut diterima pada tanggal

Mengetahui/menyetujui :

An. Kepala Bapperida Kab. Lombok Tengah,
Kasubbag. Umpeg dan Keuangan,



ERNIE ISIS SURYANI, SH
NIP. 19760727 200901 2 001

Bendahar Pengeluaran,

MIRNASARI, S. Sos
NIP. 19860214 200501 2003